

Pasang Surut Pabrik Gula De Maas di Desa Kalimas Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Pada Tahun 1977 – 2000

The Rise And Fall Of De Maas Sugar Factory in Kalimas Village Besuki Subdistrict Situbondo Regency 1977 – 2000

Nursiyah, Dra. Dewi Salindri, M.Si
Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember
Email: Nur.asyi@yahoo.co.id, 08990545916
Jln. Jawa VIb/16A Jember

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan dan mengungkap pasang surut Pabrik Gula De Maas di Desa Kalimas Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Dalam penggarapan penelitian ini digunakan metode sejarah Sosial Ekonomi dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis maupun lisan yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan Pabrik Gula De Maas disebabkan dikeluarkannya Inpres No. 9 tahun 1975 yang melandasi program TRI sehingga pada tahun 1977 PG kelebihan bahan baku, dengan kadar rendemen yang cukup baik dan didukung oleh teknis melalui perbaikan mesin-mesin penggilingan. Kenaikan produksi gula ini juga didukung dengan adanya kerja sama antara pimpinan perusahaan dan staf PG De Maas yaitu dengan penerapan program kerja yang selalu diawasi dan di pantau sehingga program kerja berjalan dengan baik, dan pada tahun 1977 mengalami peningkatan yang signifikan dan meraih 4 penghargaan. Menurunnya produksi di Pabrik Gula De Maas pada tahun 2000 karena adanya pengaruh Inpres No. 5 tahun 1998 yang memberikan kebebasan pada petani untuk memilih komoditas sesuai dengan UU No. 12/1992. Hal ini menyebabkan Pabrik Gula De Maas kekurangan bahan baku dan petani enggan menanam tebu karena merasa dirugikan dan memilih tanaman yang dianggap lebih menguntungkan. Kemunduran PG De Maas juga disebabkan oleh tidak efisiensi pabrik gula, kombinasi permasalahan antara mesin dan peralatan yang sudah tua dan kualitas bahan baku tebu yang rendah, hal ini menyebabkan rendahnya produktifitas kadar gula dalam batang tebu sehingga pada tahun 2000 mengalami pembekuan operasi. Hal ini menyebabkan tenaga kerja PG De Maas terkena PHK, akibatnya pedagang asongan bahkan warung-warung yang ada disekitarnya tutup karena sepi pembeli.

Kata kunci : Pasang Surut, Pabrik gula, Komoditas.

Abstract

The aim of research is to analyze, discribe, and express the rise and fall of De Maas Sugar Factory in Kalimas Village of Besuki district. In excuting the research, the historical method is employed by making a use of written and oral resources on the subject matter. The result of this research show that the rise of De Maas Sugar Factory is caused by the president instruction No. 9 1975 basing on the program of intensification citizen sugar cane, so in 1977, Sugar Factory is surplus of standard material for production with good enough sucrose content of sugar cane and also the sugar factory is supported by technician with the miling machine. The rise of sugar production is supported by cooperation between the factory leader and the man power og PG De Maas that they applied the cooperative program which is controlled and monitored, so the cooperative program run well, and in 1977, it getting the significance rise and reaching four awards. The falling down of De Maas Sugar Factory in 2000, because of the influince of the based on the law No. 5, 1998, it is given the freedom for the farmer to choose the commodity based on the law No. 12/1992. it caused the De Maas Sugar Factory shortage of raw material and the farmer did not want to plant the sugar cane, because they felt in suffer a financial loss and they choose the plant that they considered more profit. The falling down of PG De Maas is caused by the efisiensi levels of sugar factory, they are the problem combination among machine and tools that is older and the quality of raw sugar cane is less. In recently, it is caused the productivity of sugar level in sugar cane stalk is really low, so in 2000, it got the liquidation. This caused the manpower of PG De Maas jobless and stals that is surrounded of it got closed.

Key words: Rise and Fall, Sugar Factoty, Commodity

Pendahuluan

Negara Indonesia terletak di daerah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, curah hujan yang tinggi dan tanah yang subur. Kondisi alam tersebut membuat Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang menyebabkan sebagian besar masyarakat bermatapencaharian sebagai petani. Oleh karena itu sektor pertanian mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting bagi kesejahteraan penduduk (Nur Mahmudi Isma'il. 2001:4). Dinamika pembangunan selama ini telah membawa keberhasilan diberbagai aspek kehidupan. Terpenuhinya kebutuhan pokok yang semakin seimbang antara industri dan pertanian merupakan keberhasilan dari sektor pertanian, namun disisi lain masih diwarnai berbagai masalah dan tantangan. Catatan penting dalam keberhasilan sektor pertanian adalah meningkatnya komoditas tanaman pangan dan meningkatnya komoditas lainnya, seperti komoditas perkebunan yang telah dikembangkan oleh orang-orang Belanda (Rudi Wibowo, 2000:2).

Modernisasi yang dikembangkan oleh kapitalis agraris Barat melalui sistem tanam paksa telah menciptakan sistem perekonomian baru, yaitu sistem perekonomian dualistik. Tipe perekonomian ini disatu sisi berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekspor, tapi disisi lain berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan (Sartono Kartodirdjo, 1991:3).

Selain itu industri perkebunan besar telah memainkan peranan penting dalam perekonomian di Hindia Belanda pada kurun waktu 1830. Perkebunan berskala besar ini berawal dari sistem *cultuurstelsel* (Tanam Paksa) yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal *Johannes van den Bosch*, yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu dan tarum (nila) (Sartono Kartodirdjo, 1991:73).

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Besuki didasarkan atas pertimbangan beberapa potensi dan kondisi Karesidenan Besuki yang mendukung dalam pelaksanaan Tanam Paksa, diantaranya yaitu: kondisi geografis Karesidenan Besuki yang memiliki tanah subur sehingga merupakan modal utama dalam penyediaan bahan pertanian. Tenaga kerja yang mendukung aktifitas dalam bidang pertanian penduduknya bekerja sebagai petani, dan sistem pemerintahan yang berdasarkan ikatan feodal dan ikatan desa, dalam Pelaksanaan Tanam Paksa, tanaman yang diutamakan adalah tanaman kopi dan tebu serta ditunjang oleh pembangunan infrastruktur jalan, jembatan serta saluran irigasi. Perubahan sosial sebagai akibat sistem Tanam Paksa antara lain adalah bertambahnya jumlah penduduk Besuki yang semula berpenduduk jarang menjadi padat serta terjadi kesejahteraan hidup yang lebih baik di masyarakat Besuki. Sedangkan perubahan ekonomi yang terjadi adalah beralihnya sistem ekonomi subsistensi ke sistem ekonomi komersial yang menyebabkan berkembangnya sistem ekonomi uang dalam masyarakat pedesaan serta masuknya modal swasta.

Dengan adanya Sistem Tanam paksa tersebut menyebabkan pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk. Mereka dahulu lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong terutama tampak di kota-kota pelabuhan maupun di pabrik-pabrik gula. Dalam pelaksanaannya Sistem Sanam Paksa, yang mengharuskan penduduk desa untuk menyerahkan sebagian tanah pertaniannya agar ditanami tanaman ekspor, sehingga banyak terjadi sewa menyewa tanah milik penduduk oleh pemerintah kolonial secara paksa. Dengan demikian hasil produksi tanaman eksport bertambah, hal ini mengakibatkan perkebunan-perkebunan swasta tergiur untuk ikut menguasai pertanian Hindia Belanda di kemudian hari.

Sistem Tanam paksa yang mulai diterapkan pada tahun 1830, secara bertahap akhirnya dihapuskan oleh pemerintahan Belanda. Namun, mengingat bahwa tujuan yang ingin dicapai pemerintah Belanda untuk mendapatkan keuntungan dari tanah jajahan, maka penghapusan Sistem Tanam Paksa diikuti dengan kebijakan baru, yaitu politik pintu terbuka. Kebijakan baru ini berawal dengan dikeluarkannya Undang – Undang Agraria 1870.

Sistem ekonomi liberal beserta kapitalisme secara lambat laun, tetapi terus menerus menunjukkan garis progresif peta pertanian Pulau Jawa dan bagian utara Sumatra (Sartono Kartodirdjo, 1994:77). Mengam banyak pabrik gula di daerah dataran rendah dengan persawahan, seperti lembah sungai Brantas bagian hilir, didirikan pada tahun 1880-an dan juga pabrik gula di Karesidenan Besuki Desa Kalimas yaitu Pabrik Gula (PG) De Maas didirikan pada tanggal 23 Nopember 1896 oleh perusahaan swasta Belanda yang bernama N.V Cultuur HIIJ "De Maas". Berdirinya PG De Maas tersebut tidak terlepas dari Politik Liberal (politik pintu terbuka) Pemerintah Kolonial Belanda untuk menanamkan modalnya di Indonesia disamping itu dengan didukung dan dibangunnya sarana – sarana penunjang seperti: dam, saluran irigasi, jalan raya, jembatan, dan dermaga pelabuhan. Untuk pekerjaan ini, pemerintah Hindia – Belanda kembali mengerahkan tenaga rakyat dengan sistem kerja rodi, yang mengakibatkan penderitaan rakyat (Sartono Kartodirdjo, 1975: 177).

Masa depresi ekonomi dunia yang terjadi sekitar tahun 1933 menyebabkan industri gula di Indonesia terpukul hebat (Sartono Kartodirdjo, 94:131). Sebagai akibat depresi ekonomi dunia, maka Pabrik Gula De Maas terpuruk dan pada akhirnya pada tahun 1934 ditutup karena produksi gula di Indonesia tidak laku di pasaran dunia, sehingga banyak staf dipulangkan ke Eropa dan untuk bangkit kembali dari keterpurukan tersebut tentunya memerlukan modal yang besar. Dalam hal ini, perusahaan yang didirikan secara perseorangan terpaksa menggabungkan dirinya membentuk *Naamlooze Vennootschap* (NV), yang biasanya bekerja sama dengan sebuah Bank. Dalam hal ini PG De Maas mendapat modal dari *De Javasche Bank* (Kuntohartono, 1987:131).

Rakyat Indonesia pada waktu itu hanya menjadi pekerja dengan upah yang sangat murah bahkan di beberapa wilayah menjadi pekerja paksa. Sebagian kecil pemilik tanah juga menikmati sedikit masa kejayaan

pabrik gula pada saat itu, yaitu dengan menyewakan tanahnya untuk ditanami tebu, tetapi tentu saja dengan biaya yang sangat murah. Otomatis kejayaan pabrik gula pada masa itu tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri, melainkan dinikmati oleh bangsa Belanda yang menguasai Indonesia. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada jaman kejayaan Kolonial Belanda dari cultuurstelsel tahun 1830 hingga politik liberal tahun 1870.

Sekitar tahun 1942, bangsa Jepang masuk ke Indonesia dan mengusir bangsa Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, pabrik-pabrik gula di Jawa banyak yang berubah fungsi menjadi pabrik dan gudang senjata Jepang. Selama masa pendudukan Jepang banyak perkebunan tebu mengalami kerusakan dan pabrik gula yang ditelantarkan. Selain itu pada tahun 1943 mulai terjadi pengurangan produksi gula yang diatur dan dijalankan dibawah rencana tunggal, serta pabrik gula mengalami relokasi menjadi milik Pemerintah Jepang. Mengikuti kecenderungan umum semua pabrik gula yang menjadi kekuasaan Jepang, produksinya dari tahun ke tahun mengalami pengurangan sampai pada akhirnya penanaman tebu dihentikan, dan pabrik gula dialih fungsikan menjadi pabrik yang mendukung bagi kepentingan militer (Aiko Kurasawa, 1993:40). Pada masa itu (mulai tahun 1939 sampai 1945) adalah masa perang dunia II, dimana Jepang, Jerman, Italia dan Uni Sovyet berperang melawan negara – negara Eropa dan Amerika. Bangsa Jepang, dan juga bangsa – bangsa yang terlibat perang memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan ilmiahnya untuk keperluan perang, sehingga pabrik – pabrik gula tersebut tidak dipergunakan untuk fungsi yang seharusnya, melainkan dipergunakan sebagai sarana pendukung dan untuk memproduksi keperluan perang.

Bulan November tahun 1957 pemerintah Republik Indonesia melalui menteri Pertahanan RI saat itu melakukan pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda melalui kantor Direksi PTP Nusantara XI. Selanjutnya berdasarkan UU no 86 tahun 58 semua perusahaan perkebunan milik Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dan untuk pengelolaan selanjutnya dibentuklah Badan Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda atau disingkat BANAS yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Pengawas Umum Perusahaan Perkebunan Negara atau BPU - PPN yang berkedudukan di Jakarta dengan tugas mengawasi dan mengkoordinir kegiatan perusahaan yang berada di daerah-daerah. Dalam perkembangan ditahun-tahun berikutnya BPU - PPN dikelompokkan sesuai dengan jenis budaya tanamannya yaitu yang pertama adalah perkebunan yang mengelola aneka tanaman dan yang kedua adalah perkebunan yang mengelola gula. Perkembangan berikutnya Perusahaan Negara Perkebunan tersebut berubah bentuknya menjadi Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) beberapa pabrik gula oleh Pemerintah diputuskan untuk dikelola PT RNI. Pada tanggal 12 Desember 1957 telah diadakan pengambilalihan semua perusahaan perkebunan (termasuk perusahaan gula) milik Belanda oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pengambilalihan ini berdasarkan surat keputusan

Penguasa Militer/Menteri Pertanian daerah Karesidenan Besuki No. SPKN – 035/12/1957-11/12/1957. Pada tanggal 19 Desember 1957 pelaksanaan pengambilalihan dari pimpinan Mr. G.N. Cramer kepada RI yang diwakili oleh Sumangli, Daraan Iroe dan Achmat Ta'ip. Selanjutnya pada tahun 1958 dibentuk PPN (Baru) N.V Cultuur Mij “De Maas” dalam usahanya diwakili oleh sebuah badan PPN Baru dan Fa. Anemaet dan Co yang berkedudukan di Surabaya.

Dewasa ini, peran pabrik gula lebih mandiri dan terdesentralisasi. Hal ini terjadi seiring dengan dilepaskannya intervensi pemerintah dalam kebijakan harga gula nasional. Semula, produksi gula dari pabrik gula dibeli dan didistribusikan oleh BULOG berdasarkan KEPPRES no. 43 tahun 1971, dan dipertegas lagi oleh SK menteri perdagangan dan koperasi no. 122/KP/III/1981 yang menetapkan BULOG sebagai pembeli tunggal seluruh produksi dalam negeri.

Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor: 05/SK/Mentan/Bimas/IV/1990 tentang Perubahan Ketentuan Bagi Hasil Tebu Rakyat yang diolah di pabrik gula. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor: 06/SK/Mentan/Bimas/IV/1990 tentang Pemberian Premi Mutu Tebu Bagi Tebu Rakyat yang diolah di Pabrik Gula. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor:07/SK/Mentan/Bimas/IV/1990 tentang Penetapan Harga Tetes Bagian Petani Tebu Rakyat yang diolah di pabrik gula. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor: 04/SK/Mentan/Bimas/IV/1992 tentang Ketentuan Bagi Hasil Tebu Rakyat yang diolah di pabrik gula. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sistem ini mencakup tiga hal, yaitu pertama, peningkatan secara keseluruhan produksi gula; kedua, peningkatan partisipasi rakyat; dan ketiga, peningkatan produktivitas per hektar.

Rumusan Masalah

Batasan masalah dalam setiap penulisan perlu dirumuskan secara jelas dengan maksud untuk membantu arah pokok permasalahan dan agar pembahasan menjadi lebih sistematis. Untuk itulah dalam setiap permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penulisan harus diberi batasan yang jelas, sehingga pembahasan diperoleh sesuai dengan target yang diharapkan. Penentuan rumusan masalah itu juga untuk menghindari terjadinya kesimpang-siuran dan meluasnya masalah yang akan diteliti. Penentuan ruang lingkup permasalahan perlu, agar tidak terjerumus pada sekian banyak data yang diteliti.

1. Apa yang melatarbelakangi peningkatan produksi Pabrik Gula De Maas pada tahun 1977?
2. Faktor apakah yang menyebabkan PG De Maas mengalami penurunan pada tahun 2000?
3. Apa dampak Beku Operasi PG De Maas dalam bidang sosial ekonomi bagi karyawan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode wawancara diharapkan mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas agar nantinya

penelitian tersebut tidak melenceng jauh dari apa yang di harapkan sebelumnya, sehingga hasil penelitian tersebut dapat mendatangkan kegunaan baik bagi peneliti sendiri, masyarakat maupun pemerintah.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian haruslah terdapat tujuan penelitian yang jelas agar nantinya penulisan dapat terarah dan diketahui maksudnya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji latar belakang meningkatnya produksi pabrik gula De Maas pada periode 1977.
2. Mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan Pabrik Gula De Maas mengalami penurunan pada tahun 2000.
3. Mengkaji dampak kemerosotan PG De Maas terhadap kehidupan sosial ekonomi bagi karyawan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan tentu saja memiliki ragam kegunaan, adapun kegunaan tersebut ialah sebagai wujud harapan yang diinginkan oleh penulis, hasil penelitian ini nantinya dapat ditindak lanjutkan (*follow up*) dalam pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan ini. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah daerah dan pabrik gula lainnya.
2. Hasil penulisan ini di harapkan dapat memberi sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan, terutama bagi ilmu-ilmu sosial khususnya sejarah sosial-ekonomi Indonesia.
3. Dapat memberi stimulasi PG De Maas pada para peneliti yang lain untuk mengkaji dari sudut pandang yang berbeda.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan terkait erat dengan jenis penulisan yang dilakukan. Penelitian ini adalah kajian sejarah sehingga metode yang tepat untuk digunakan ialah metode sejarah. Menurut Kuntowijoyo, metode sejarah adalah cara-cara penelitian dan penulisan sejarah, yang langkah-langkahnya meliputi pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik ekstern, analisis dan interpretasi penyajian dalam bentuk tulisan (Kuntowijoyo, 1981:81).

Metode sejarah menurut Louis Gottschalk adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Metode penelitian sejarah terdiri atas empat langkah, yaitu: (1) heuristik (pengumpulan data); (2) kritik sumber (kritik eksternal dan kritik internal); (3) interpretasi; dan (4) historiografi. Penulisan sejarah yang bersifat deskriptif analitis adalah bentuk penulisan yang berusaha memaparkan dan menjelaskan permasalahan yang dikaji secara kritis. Model ini diterapkan untuk menghindari bentuk tulisan sejarah yang hanya berupa pemaparan peristiwa tanpa

Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa 2013

pertimbangan kausalitas suatu peristiwa (Louis Gottschalk, 1975:32). Dengan kata lain, bentuk penulisan adalah yang diistilahkan Sartono Kartodirdjo sebagai “sejarah non-naratif” (Sartono Kartodirdjo, 1992:9).

Penelitian ini juga termasuk dalam wilayah sejarah kontemporer, sehingga metode sejarah lisan juga tidak bisa ditinggalkan. Penerapan sejarah lisan itu sendiri biasanya mencakup masalah pengaturan, persiapan dan pelaksanaan wawancara. Oleh karena itu, sejarawan masih perlu mencari sendiri informasi pelengkap dengan teknik wawancara yang baik agar diperoleh keterangan-keterangan lisan yang dapat dipertanggungjawabkan (Kuntowijaya, 1981:22).

Hasil dan Pembahasan

Penduduk Desa Kalimas di Besuki

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa bagian utara dengan letak 7°35' – 7°44' Lintang Selatan dan 113°30' – 114°42' Bujur Timur. Adapun batas-batas Kabupaten Situbondo antara lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.

Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 Km² atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari barat ke timur lebih kurang 140 Km. Pantai utara umumnya berdataran rendah dan di sebelah selatan berdataran tinggi. Dari 17 kecamatan yang ada, diantaranya terdiri dari 14 kecamatan yang memiliki pantai dan 4 kecamatan yang tidak memiliki pantai, yaitu Kecamatan Sumbermalang, Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan Situbondo dan Kecamatan Panji. Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Banyuputih dan kecamatan paling kecil adalah Kecamatan Besuki.

Kecamatan Besuki merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Situbondo yang dilalui lalu lintas jalan propinsi dari arah Surabaya menuju Banyuwangi dan Bondowoso dengan letak 7°42'20" sampai dengan 7°47'23" Lintang Selatan dan 113°40'39" sampai dengan 113°42'15" Bujur Timur, berbentuk memanjang dari utara ke selatan. Pantai Utara pada umumnya berdataran rendah dan di sebelah selatan berdataran tinggi. Dari posisi tersebut untuk Kecamatan Besuki ± 66°04' arah (utara-barat) atau 23°55' arah (barat-utara).

Adapun batas-batas Kecamatan Besuki sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Suboh,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sumbermalang dan Kecamatan Jatibanteng,

- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Banyuglugur.

Kondisi geografis Kecamatan Besuki sebagian besar berdataran rendah dan sebagian kecil berdataran tinggi. Kecamatan Besuki mempunyai ketinggian rata-rata 0-500 m di atas permukaan laut. Luas Kecamatan Besuki adalah 26,08 Km² atau 2.608 Ha, terdiri dari 2 desa memiliki pantai dan 8 desa lainnya tidak memiliki pantai. Satu desa terletak di dataran tinggi dan 9 desa terletak di dataran rendah. Dari 10 desa di Kecamatan Besuki desa terluas adalah Desa Blimbing seluas 4,97 Km², sedangkan desa yang paling sempit adalah Desa Pesisir. Menurut kondisi tanah Kecamatan Besuki mengandung mediteran dan latosol, oleh karena itu Besuki cocok untuk tanaman pertanian dan perkebunan seperti tebu, tembakau, padi, jagung, dan palawija (Profil Besuki, 1998:3).

Salah satu yang menjadi obyek penelitian adalah Desa Kalimas. Di desa ini adalah satu-satunya yang dibangun Pabrik Gula De Maas peninggalan Kolonial Belanda. Desa ini adalah tempat yang sangat strategis untuk pembangunan sebuah perusahaan, karena didukung adanya irigasi yang cukup memadai. Disamping itu tempat ini sangat strategis, karena terletak di tepi jalan sehingga memudahkan transportasi untuk proses pengangkutan tebu.

Secara demografis, dominasi etnis Madura di wilayah Besuki tidak terlepas dari arus migrasi Madura yang berlangsung sejak lama. Menurut Babad Besuki, sebelum munculnya kota Besuki di daerah ini terdapat sebuah delta yang bernama Demung (Edi Burhan Arifin, *dkk*, 2008:92). Wilayah ini pernah dijadikan benteng pertahanan orang-orang Makasar yang dipimpin oleh Kraeng Galesong dalam pertempurannya melawan Mataram (Sartono Kartodirdjo, *dkk*, 1975:260)). Sejak jaman Mataram orang-orang Madura dilaporkan telah mulai bermigrasi ke wilayah ini. Akan tetapi, tidak diketahui secara pasti jumlah penduduk wilayah Besuki pada masa itu.

Pemerintahan di Kabupaten Besuki pada awalnya lahir dari kademangan kecil yaitu Kademangan Besuki. Nama asli Besuki berasal dari Wasuki, berarti dewa ular yang berdiam di daerah ini, atau menurut arti lain Besuki adalah sejahtera (Edi Burhan Arifin, *dkk*, 2008:112). Nama Demung dalam Babad Besuki sebagai embrio kota Besuki. Pada mulanya desa tersebut dibuka oleh Kyai Wirobroto. Ia berasal dari Desa Tanjung Pamekasan. Sejak kedatangannya, lambat laun arus lalu lintas antara Pamekasan dan daerah yang baru dibuka itu semakin ramai. Pada tahun 1755 Kyai Wirobroto diangkat sebagai demang. Pada tahun 1760 dilakukan pemindahan pusat pemerintahan yakni dari Demung ke Barat Sungai Deluwang dan kota baru ini dinamai Besuki, yang berarti selamat, aman dan sejahtera. Pemindahan kota ini dilakukan oleh Kyai Bagus Kasim yang setelah diangkat menjadi patih bergelar Kyai Worodipuro, karena budi pekertinya yang halus dan luhur, orang mengenal dia dengan sebutan Demang Alus. Setelah menjabat patih, iapun disebut Kyai Patih Alus. Pada tahun 1764 karena sudah lanjut usia Kyai Patih Alus yang kedudukannya sebagai patih digantikan oleh puteranya yaitu Kyai

Wirodipuro, pergantian ini dilakukan atas persetujuan Kyai Joyolelono. Setelah Demung dipimpin oleh Kyai Joyolelono maka Demung telah menjadi mekar dan ramai, maka muncullah nama Besuki.

Sekitar tahun 1900, semakin banyak orang Jawa bermigrasi ke Besuki. Menguatnya migran Jawa terkait dengan perkembangan jaringan transportasi di Besuki (Nawiyanto, 2009:10). Perkembangan sarana angkutan tidak hanya membuat mobilitas geografis lebih mudah, tetapi juga menekan biaya transportasi. Keduanya mendorong lebih banyak orang khususnya dari kalangan miskin untuk mencari peluang-peluang ekonomi di daerah lain (Nawiyanto, 2009:10). Orang Jawa dipandang lebih berpengalaman dengan tipe ekologi sawah dibanding dengan orang Madura yang lebih kental dengan ekologi tegalan (Kuntowoyo, 1995:302-304), sehingga orang Madura dikenal sebagai pekerja keras dan berkarakter keras.

Data demografis yang lebih jelas baru ada sejak awal abad ke-19. Pada awal abad ke-19 penduduk Besuki diperkirakan sekitar 80.000 jiwa (Kuntowoyo, 1995:53-54). Menurut Tennekes, penduduk wilayah Situbondo pada tahun 1890 mencapai sekitar 250.000 jiwa, lebih besar dibanding Jember yang penduduknya masih berjumlah sekitar 180.000 jiwa (J. Tennekes, 1963:335). Pertumbuhan penduduk secara detail dapat dilihat dalam table 1 sebagai berikut:

Table 1
Pertumbuhan Penduduk Karesidnan Besuki Tahun 1920 – 1969

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan penduduk (penduduk/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
1920	329.340	-%	201.00
1930	402.179	2,21%	245.45
1969	463.215	0,38%	282.71
1980	524.803	1,20%	320.29

Sumber: Untuk tahun 1920 dan 1930 dari J. Tennekes, "Bevolkingsspreiding der Resideentie Besuki in 1930", *Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap*, 80,2 (1963). Untuk tahun 1969-1980 dari BPS Kabupaten Situbondo, "Indikator Makro Sosial Situbondo" *Laporan* (Situbondo BPS Kabupaten Situbondo, 2008).

Berdasarkan tabel di atas, jumlah persentase pertumbuhan penduduk Besuki yang tertinggi berlangsung antara tahun 1920 – 1930, yaitu sebesar 2,21%. Hal ini disebabkan oleh banyaknya migrasi orang-orang Madura ke Besuki seiring dengan perluasan perkebunan (J. Tennekes, 1963:335). Pertumbuhan penduduk pada tahun 1930 – 1960 terjadi penurunan, faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan penduduk periode ini adalah depresi ekonomi tahun 1930-an, pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan, serta krisis tahun 1960-an. Akibat depresi ekonomi ini, maka arus migrasi dari Madura dilaporkan mengalami penurunan tajam. Banyak peluang kerja yang menghilang karena merosotnya sektor perkebunan

(Hiroyosi Kano, 1986:20). Pada masa Jepang dan revolusi kemerdekaan, rendahnya pertumbuhan penduduk disebabkan merosotnya standar kehidupan dan meningkatnya angka kematian terkait krisis pangan maupun ketidakstabilan politik karena perang (Nawiyanto, 2009:176). Persentase penduduk kembali meningkat pada tahun 1970-an, hal ini terjadi seiring dengan stabilitas yang membaik. Laju pertumbuhan berangsur turun pada dekade 1980 seiring dengan gencarnya kampanye Keluarga Berencana (KB) yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru.

Beragam sektor ekonomi digeluti penduduk di Desa Kalimas Kecamatan Besuki. Kegiatan ekonomi di Desa Kalimas mempunyai kaitan dengan masyarakat sekitar meliputi beberapa sektor, yaitu: 1) perkebunan, 2) pertanian, 3) buruh, dan 4) peternakan. Lewat berbagai sektor inilah peranan masyarakat sebagai agen pertumbuhan ekonomi direalisasikan. Sektor perkebunan masih menjadi salah satu sektor yang mendominasi perekonomian masyarakat Desa Kalimas. Hal ini tidak terlepas dari potensi desa ini yang sangat cocok untuk daerah pertanian dan perkebunan. Sebagai daerah yang berbasis pada sektor pertanian, maka pertanian masih memegang peranan penting. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, selain itu pertanian juga merupakan sektor yang mampu banyak menyerap tenaga kerja. Jumlah penduduk yang bekerja dalam bidang pertanian dan perkebunan mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dalam bidang pertanian dan perkebunan, karena pertanian dan perkebunan merupakan dasar perekonomian masyarakat Desa Kalimas Kecamatan Besuki. Perkebunan adalah mata pencaharian utama bagi masyarakat, karena wilayah Besuki merupakan sentra perkebunan tebu, tembakau dan palawija. Mata pencaharian yang kedua adalah pertanian hal ini didukung oleh keadaan geografis yang sangat cocok untuk pertanian. Sistem perkebunan dan pertanian bagi mereka adalah cara agar mereka dapat hidup, terlebih bagi masyarakat desa. Masyarakat yang berkarakteristik agraris atau pertanian dapat dilihat dari ciri berikut: 1) sifat homogen masyarakat dalam mata pencaharian, sikap hidup maupun tingkah laku, 2) adanya hubungan sosial sesama anggota masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, 3) adanya sistem ekonomi jasa, yaitu menyumbang tenaga mereka untuk keperluan sosial tanpa menerima bayaran, seperti membantu diacara hajatan. Hal ini sama dengan sistem gotong royong.

Pabrik Gula De Maas dan Masyarakat Besuki

Tanaman tebu merupakan salah satu tanaman yang diperkenalkan Sistem Tanam Paksa yang diterapkan oleh Pemerintah kolonial Belanda, karena dengan penerapan teknologi modern kepada perluasan produksi untuk pasaran dunia. (Kuntohartono, 1987:65). Sistem Tanam Paksa di Jawa dilakukan di daerah gubernemen yang terdiri dari 18 wilayah karesidenan, salah satunya adalah Besuki. Karesidenan Besuki dijadikan daerah pelaksanaan Sistem Tanam Paksa karena memiliki tanah yang subur, banyak tersedianya tanah pertanian, serta penduduk yang jumlahnya mencukupi untuk dijadikan sebagai tenaga

kerja dalam produksi tanaman ekspor, meskipun untuk meningkatkan jumlah penduduk masih harus mendorong migrasi orang-orang Madura dan Jawa ke wilayah Besuki. Sistem Tanam Paksa di Karesidenan Besuki banyak memberi keuntungan, yang pertama masyarakat diberikan kebebasan untuk membayar pajak tanah, yang kedua menerima upah tertinggi diantara karesidenan yang lain.

Sistem Tanam Paksa di Besuki didasarkan atas pertimbangan beberapa potensi dan kondisi Karesidenan Besuki yang mendukung dalam Pelaksanaan Tanam Paksa, diantaranya yaitu: kondisi geografis di Karesidenan Besuki sangat subur sehingga cocok untuk penyediaan lahan pertanian, keadaan penduduk yang mayoritas bekerja sebagai petani, dan sistem pemerintahan yang berdasarkan ikatan feodal dan ikatan desa. Dalam Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, tanaman yang diutamakan adalah tanaman kopi dan tebu serta ditunjang oleh pembangunan infrastruktur jalan, jembatan serta saluran irigasi. Pertumbuhan penduduk yang sebagai akibat Sistem Tanam Paksa antara lain adalah bertambahnya jumlah penduduk Besuki yang semula berpenduduk jarang menjadi padat. Sedangkan perubahan ekonomi yang terjadi adalah beralihnya sistem ekonomi subsistensi ke sistem ekonomi komersial yang menyebabkan berkembangnya sistem ekonomi uang dalam masyarakat pedesaan serta masuknya modal swasta.

Di Desa Kalimas Karesidenan Besuki Pabrik Gula (PG) De Maas didirikan pada tanggal 23 Nopember 1896 oleh perusahaan swasta Belanda yang bernama N.V Cultuur Mij "De Maas". Berdirinya PG De Maas tersebut tidak terlepas dari Politik Liberal (politik pintu terbuka) pemerintah kolonial Belanda untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk pekerjaan ini, pemerintah Belanda kembali memanfaatkan tenaga rakyat dengan sistem kerja rodi, sebagai akibatnya rakyat mendapat penderitaan yang sangat berat. Lebih – lebih saat perdagangan hasil tanaman ekspor mulai menurun, karena harga di pasaran dunia jatuh karena daerah – daerah Eropa mulai menanam tebu dan memproduksi gula (Sartono Kartodirjo, 1994:89).

Sekitar tahun 1942, bangsa Jepang masuk ke Indonesia dan mengusir bangsa Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, pabrik-pabrik gula di Jawa banyak yang berubah fungsi menjadi pabrik dan gudang senjata Jepang. Selama masa pendudukan Jepang banyak perkebunan tebu mengalami kerusakan dan pabrik gula yang ditelantarkan. Selain itu pada tahun 1943 mulai terjadi pengurangan produksi gula yang diatur dan dijalankan dibawah rencana tunggal, serta pabrik gula berpindah tangan menjadi milik Pemerintah Jepang. Mengikuti kecenderungan umum semua pabrik gula yang menjadi kekuasaan Jepang, produksinya dari tahun ke tahun mengalami pengurangan sampai pada akhirnya penanaman tebu dihentikan, dan pabrik gula dialih fungsikan menjadi pabrik yang mendukung bagi kepentingan militer (Aikko Kurasawa, 1993:40). Pada masa itu (mulai tahun 1939 sampai 1945) adalah masa perang dunia II, dimana Jepang, Jerman, Italia dan Uni Sovyet berperang melawan negara – negara Eropa dan Amerika. Bangsa Jepang, dan juga bangsa – bangsa yang

terlibat perang memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan ilmiahnya untuk keperluan perang, sehingga pabrik – pabrik gula tersebut tidak dipergunakan untuk fungsi yang seharusnya, melainkan dipergunakan sebagai sarana pendukung dan untuk memproduksi keperluan perang.

Pasca kemerdekaan RI, hampir semua perusahaan asing diduduki oleh para pejuang, bahkan beberapa diantaranya dibakar, karena konflik senjata yang tidak dapat dihindari. Untuk menjaga ketertiban dan kelangsungannya, kemudian Pemerintah RI mengambil langkah pengamanan di bidang hukum, yaitu dengan mengeluarkan PP.RI.No. 3. Tanggal 21 Maret 1946, yang menetapkan bahwa semua perusahaan gula dijalankan dibawah kekuasaan negara. Selanjutnya dibentuk badan pemerintah yang bekerja sebagai badan hukum dengan modal terpisah dari keuangan Negara, yaitu Badan Penyelenggaraan Perusahaan Gula Negara (BPGN). Badan inilah yang kemudian mengawasi jalannya pabrik gula, termasuk PG De Maas. Di Indonesia terjadi banyak perubahan baik dalam sektor politik maupun ekonomi. Perubahan disektor politik meliputi bentuk negara dan pemerintah sebelum merdeka. Indonesia hanya merupakan negara jajahan, sehingga segala urusan politik dikuasai penjajah termasuk pemerintahannya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia sudah menjadi suatu negara kesatuan yang berbentuk republik dan sudah mempunyai pemerintahan sendiri. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (UUD 1945, 1984:8).

Setelah berakhirnya revolusi kemerdekaan, industri gula mulai bangkit dan berbenah diri. Pada saat ini terjadi perubahan penting dalam kehidupan politik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu perubahan politik dari Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin. Pengaruh dari perubahan tersebut adalah keluarnya Deklarasi Ekonomi yang menjadi sumber kebijakan Ekonomi Terpimpin. Sejalan dengan deklarasi di atas, pemerintah mulai mengambilalih perusahaan asing dan dikelola oleh pemerintah Indonesia, tapi dalam bidang produksi gula masih mengalami kemerosotan. Industri gula pada masa ini belum mampu mengembalikan produktifitasnya seperti yang dicapai pada masa Pemerintah Kolonial Belanda. Padahal kebijakan yang diterapkan tidak berbeda jauh dari kebijakan pada masa kolonial (Sartono Kartodirdjo, 1994:180).

Tanggal 6 Juni 1946 keluar lagi PP.No.4 tentang pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN). Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pada masa itu perusahaan swasta asing diusahakan milik Negara (Sartono Kartodirdjo, 1975:51). Pengelolaan Manajemen PG De Maas oleh PPN tersebut berlangsung pada tahun 1949. Akhir tahun 1949 dengan adanya kesepakatan perjanjian KMB tentang keuangan dan perekonomian, maka ijin menjalankan perusahaan-perusahaan perkebunan dikembalikan kepada pemilik semula. Semua milik asing (Eropa maupun Cina oleh direksi masing-masing diusahakan kembali pada sistem dan dasar hukum

yang lama seperti sebagaimana berlaku sebelum tahun 1942 (Mubyarto, 1984:30). Penyerahan kedaulatan status pabrik gula ini dikembalikan kepada pengelolaan NV dan pemiliknya tetap BI melakukan rehabilitasi terhadap gedung-gedung, mesin gilingan dan mesin-mesin yang lain .

Tahun 1956 masalah Irian Barat, belum terselesaikan timbul dugaan bahwa Belanda sengaja tidak mengembalikan Irian Barat. Ketidakjujuran Belanda membuat Pemerintah RI dan rakyat Indonesia menjadi tidak sabar lagi dan secara sepihak membatalkan KMB. Hal ini dituangkan dalam UU No. 13 tahun 1956. Akibat pembatalan itu semua perusahaan, perkebunan dan pabrik serta warga Belanda di Indonesia diawasi dengan ketat. Oleh karena itu membutuhkan rehabilitasi besar – besaran sampai akhirnya dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia sekitar tahun 1957.

Tahun 1957 Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pertahanan RI saat itu melakukan pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda melalui kantor Direksi PTP Nusantara XI. Selanjutnya berdasarkan UU no 86 tahun 1958 semua perusahaan perkebunan milik Belanda dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia. Pengelolaan selanjutnya dibentuklah Badan Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda atau disingkat BANAS yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Pengawas Umum Perusahaan Perkebunan Negara atau BPU - PPN yang berkedudukan di Jakarta. Badan ini bertugas mengawasi dan mengkoordinir kegiatan perusahaan yang berada di daerah-daerah. Dalam perkembangan BPU - PPN dikelompokkan sesuai dengan jenis budidaya tanamannya seperti pertama adalah perkebunan yang mengelola aneka tanaman. Kedua adalah perusahaan industri yang mengelola gula. Perkembangan berikutnya Perusahaan Negara Perkebunan tersebut berubah bentuknya menjadi Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP). Pada masa ini beberapa pabrik gula oleh pemerintah diputuskan untuk dikelola PT RNI. Pada tanggal 12 Desember 1957 telah diadakan pengambilalihan semua perusahaan perkebunan (termasuk perusahaan gula) milik Belanda oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pengambilalihan ini berdasarkan surat keputusan Penguasa Militer/Menteri Pertanian daerah Karesidenan Besuki No. SPKN – 035/12/1957-11/12/1957. Pada tanggal 19 Desember 1957 pelaksanaan pengambilalihan dipimpin Mr. G.N. Cramer kepada Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Sumangli, Daraan Iroe dan Achmat Ta'ip. Selanjutnya pada tahun 1958 dibentuk PPN (Baru) N.V Cultuur Mij "De Maas" dalam usahanya diwakili oleh sebuah badan PPN Baru dan Fa. Anemaet dan Co yang berkedudukan di Surabaya.

Pada tanggal 28 Januari 1963 PG "De Maas" mengalami reorganisasi PPN dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 dan II tahun 1963, maka oleh biro pusat dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPU-PPN), yang masing-masing untuk gula, karet, tembakau dan aneka tanaman. Kantor perwakilan Jawa Timur dirubah menjadi kantor inspeksi dan pabrik-pabrik gula yang berbadan hukum. PPN baru berubah menjadi Inspeksi Perusahaan Perkebunan Negara

(IPPN). Dalam rangka memperbaiki sistem sewa tanah yang dirasakan tidak sesuai lagi, maka dikeluarkan peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 19 tahun 1963 tentang sistem bagi hasil. Akibat dari peraturan tersebut maka pabrik gula De Maas tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh lahan.

Pada tahun 1968 IPPN berubah menjadi Perusahaan Negara Perkebunan XX (PNP XX) yang keseluruhan berjumlah 28 buah, 8 diantaranya PNP gula, dalam PP tersebut dicantumkan pula ketentuan bahwa PNP tersebut menjadi (PT. Perseroan) (Mubyarto dan Damayanti, 1990:15), dengan kantor pusat di Surabaya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor XIV tahun 1981 PNP XX menjadi Persero Terbatas Perkebunan XX (PTPXX) dengan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 1973. Meskipun sudah didirikan Dewan Gula Indonesia pada tahun 1972, keadaan pergulaan Indonesia masih belum pulih seperti pada masa kolonial Belanda dulu. Oleh karena itu banyak pabrik gula baru mulai dibangun di luar Jawa, tahun 1981 sampai dengan tahun 1986. Keadaan ini membuat pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 28 tahun 1982 untuk menggairahkan industri gula nasional, yaitu dengan menggalakkan Program TRI, melakukan rehabilitasi pabrik gula, dan perbaikan kebijakan harga gula.

Pada tahun 1975, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 9/1975, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan perubahan struktural dalam organisasi industri gula. Perubahan yang mendasar adalah bahwa penanaman tebu yang semula merupakan tanggung jawab pabrik gula yang dengan cara menyewa tanah petani lalu mengelola sendiri (penanaman/perkebunan tebu), diubah menjadi tanggung jawab petani sendiri. Artinya, tanaman tebu menjadi tanaman milik rakyat, sedangkan pabrik gula hanya berfungsi pengelola tebu menjadi gula, dan sebagai “penasehat teknis” dalam hal budidaya tebu. Sistem ini dikenal sebagai Tebu Rakyat Intensifikasi atau TRI. Salah satu tujuan utama program TRI adalah agar petani diberikan kesempatan untuk dapat menjadi “tuan di tanahnya sendiri. Dengan hal ini menyebabkan petani terpaksa menanam tebu karena ditekan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan koramil, sehingga petani takut melawan pemerintah.

Produksi Gula Dari Tahun ke Tahun

Tebu yang diproduksi di PG De Maas ini diperoleh dari Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) maupun Tebu Rakyat Bebas. TRI adalah tebu yang ditanam para petani pada areal perkebunan tebu milik petani dengan mendapat bimbingan dan penyuluhan dari pabrik gula serta mendapat kredit permodalan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sedangkan TRB adalah tebu yang ditanam para petani tebu rakyat di lahannya dengan mengandalkan pada permodalan sendiri tanpa mendapatkan kredit. Hasil panen TRI tidak diolah petani sendiri melainkan diserahkan kepada pabrik gula untuk diolah menjadi gula pasir dan petani mendapatkan haknya secara bagi hasil. Hasil panen TRB sebagian besar pengolahannya diserahkan kepada pabrik gula dan hanya sebagian kecil yang diolah sendiri oleh petani menjadi gula merah (Kuntowijoyo, 1995:66).

Proses pengolahan tebu adalah memeras nira dari batang tebu dan memprosesnya menjadi gula kristal dengan tingkat kehilangan gula (pol) sekecil mungkin. Tingkat kehilangan tersebut dapat terjadi pada ampas, blotong dan tetes. Oleh karena itu pengembangan dan pemilihan komoditas unggulan didasarkan pada pendekatan wilayah (kawasan) dan pendekatan pasar. Cara ini diharapkan dapat menjamin kesinambungan produksi melalui pemanfaatan keunggulan daerah sebagai basis pengembangan (spesifik atau keunggulan lokal), dan dapat menumbuhkan pusat-pusat (sentra) komoditas spesifik wilayah yang mendorong keterkaitan antara wilayah secara dinamis dan membangkitkan interaksi sektor produksi dan pasar (A. G Kartasapoetra, 1988:77).

Rata-rata mutu tebu yang berada di pabrik gula di Jawa memiliki mutu yang rendah dengan nilai pol berkisar antara 8.3 – 11.2, nilai nira perasan pertama 9.9 - 12.4 dan kadar kotoran tebu antara 6 - 20 persen. Rendahnya mutu tebu diperparah dengan kondisi beberapa pabrik gula yang sudah tua. Sekitar 68 persen dari jumlah pabrik gula yang ada telah berumur lebih dari 75 tahun dan kurang mendapat perawatan yang memadai. Hal ini menyebabkan efisiensi yang rendah dan meningkatkan biaya produksi per unit (Direktorat Jenderal Bina Produksi, 2004:18). Rata-rata mutu tebu di pabrik gula De Maas memiliki mutu dengan nilai 7.46 – 10.41. Hal ini disebabkan karena mutu tebu yang masih belum matang untuk digiling dan memang dari segi perawatan penanaman kurang tepat sehingga memiliki mutu yang rendah.

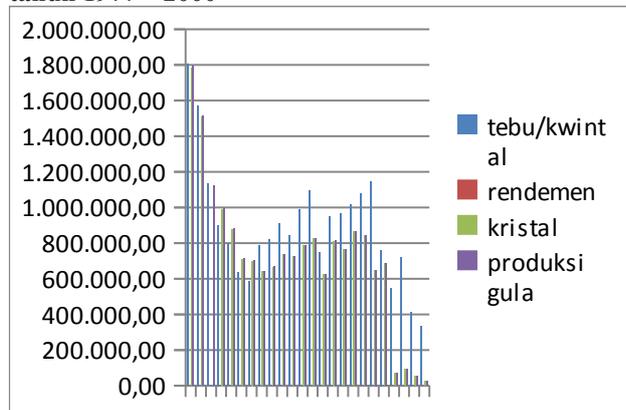
Proses pembuatan gula dari bahan dasar tebu di PG De Maas menggunakan sistem pemurnian atau sulfitasi netral dengan menggunakan bahan pembantu seperti kapur, belerang, flocculant, dengan cara sulfitasi ini produksi yang dihasilkan adalah gula / SHS (*Superieuvre Hoofd Suiker*). Bahan dasar tebu diperoleh dari areal tebu rakyat dan tebu pabrik (tebu sewa). Di samping itu memberi kesempatan kepada tebu perorangan (Tebu Rakyat Bebas/ TRB) atau tebu milik suatu badan usaha.

Peranan bahan baku dalam pabrik gula sangat penting dan bahkan merupakan kunci suksesnya pabrik gula. Hakekatnya produksi gula itu berada batang tebu bukan di pabrik. Pabrik gula tugasnya hanya mengambil kandungan gula (suchrose) yang terdapat dalam batang tebu. Penyebab utama lemahnya daya saing pabrik gula selama ini adalah karena telah terbebani biaya produksi yang sangat tinggi akibat menggiling tebu yang rendemennya rendah.

Produktifitas adalah resultan dari produksi tebu per satuan lahan (kwintal tebu per hektar) dan kadar (%) gula dalam tebu (rendemen). Program peningkatan produktifitas, harus didukung oleh pihak-pihak yang terkait yaitu, petani, pabrik gula, pemerintah dan lembaga pendukung yang terdiri dari lembaga kajian dan penelitian gula, lembaga keuangan dan lembaga swadaya masyarakat. Koordinasi antar pihak di atas menjadi penentu keberhasilan program ini. Faktor utama yang harus ditempuh untuk meningkatkan produktivitas adalah upaya peningkatan rendemen melalui optimalisasi penerapan sapta usaha tani dan efisiensi teknis di pabrik gula. Pertama, telah terbukti upaya memperluas lahan justru telah menurunkan produktivitas. Kedua, selain meningkatkan produktivitas, peningkatan rendemen akan menyebabkan pendapatan petani meningkat sehingga menambah semangat para petani dalam menanam dan merawat tebunya, dan menumbuhkan minat mantan petani tebu untuk kembali menanam tebu.

Perkembangan Produksi Gula/Ha (jumlah tebu dalam hitungan kwintal) Tahun 1977 – 2000

Grafik perkembangan produksi gula PG De Maas tahun 1977 – 2000



Produksi gula tahun 1977 – 2000

Sumber: Laporan tahunan Pabrik Gula De Maas bagian produksi tahun 1977 – 2000

Pada grafik di atas PG De Maas mengalami peningkatan produksi yang signifikan pada tahun 1977 yaitu 1.792.762,200 kwintal. Hal ini disebabkan adanya cukup bahan baku yang akan digiling dalam 100 hari sehingga produksi gula yang diperoleh PG De Maas meningkat di atas rata-rata, di masa kepemimpinan Administratur Sadjiwinarto. Oleh sebab itu, pada tahun 1977 PG De Maas meraih empat piagam yang terdiri dari, satu piagam penghargaan dan tiga piagam kejuaraan,

yaitu (1) piagam penghargaan atas prestasi yang dicapai dalam produksi rata-rata per hektar haulur tanaman sendiri pada tahun giling 1977, yang telah dapat melampaui produksi haulur rata-rata per hektar tahun-tahun sebelumnya sejak tahun 1950, (2) piagam sebagai juara umum II dalam rangka lomba peningkatan prestasi dan efisiensi kerja antar pabrik-pabrik gula P.T. Perkebunan XXIV-XXV, (3) piagam sebagai juara II bagian tanaman dalam rangka lomba peningkatan prestasi dan efisiensi kerja antar pabrik-pabrik gula P.T. Perkebunan XXIV-XXV, (4) piagam sebagai juara umum II bagian instalasi dan pabrikasi dalam rangka lomba peningkatan prestasi dan efisiensi kerja antar pabrik-pabrik gula P.T. Perkebunan XXIV-XXV. Selain itu, PG De Maas mengatasi masalah di lapangan dengan cara, (a) Memberikan pengairan diawal pertumbuhan, biasanya selama 3 bulan sebelum air hujan mencukupi kebutuhan air tanaman. (b) Melakukan pemupukan untuk mencukupi unsur hara. Pupuk yang diberikan adalah pupuk anorganik (Urea dan ZA, SP-36, dan KCI) untuk mencukupi kebutuhan unsur hara makro yang dianggap kurang. (c) Penggunaan varietas yang dianggap sesuai ditanam di lahan kering dengan kriteria memiliki potensi hasil tinggi. Namun pada tahun 1984 terjadi penurunan yang disebabkan oleh: (a) Pemberian air memang mampu memperbaiki pertumbuhan tanaman, tetapi keterbatasan jumlah air dan tambahan biaya menimbulkan masalah ini tidak mudah diatasi di lapangan. Air menjadi mahal jika diberikan secara tidak tepat, khususnya di lahan kering yang umumnya sumber air untuk irigasi adalah sumur. (b) Pemupukan yang dilakukan ternyata sering tidak berpengaruh besar terhadap hasil. Hal ini karena kondisi fisik tanah kurang baik akibat rendahnya bahan organik. Daya serap tanah kurang baik, sehingga serapan hara oleh akar tanaman menjadi kurang baik. (c) Penggantian varietas ternyata belum mampu mengatasi permasalahan budidaya tebu di lahan kering. Beberapa varietas yang digunakan ternyata tidak cocok ditanam di lahan kering. Diperlukan suatu pengujian yang cermat terhadap varietas yang akan ditanam di lahan kering, sebab varietas yang memiliki potensi hasil tinggi belum tentu sesuai untuk tiap wilayah. Pemilihan varietas harus didasarkan pada sifat toleran terhadap kekeringan dan memiliki respon tinggi terhadap pemberian air. Pada tahun 1990 terjadi penurunan produksi gula, hal ini disebabkan karena: (a) Umumnya di lahan kering tebu ditanam di awal musim hujan. Pada saat itu curah hujan masih rendah dan kadar air tanah yang kurang terjamin, bahkan sering kurang air terutama di awal pertumbuhan, sehingga pertumbuhan awal menjadi terhambat. (b) Kesuburan tanah kurang baik sehingga ketersediaan unsur hara makro yang sangat dibutuhkan tebu tidak terpenuhi. Akibatnya selain pertumbuhan terganggu, proses pembentukan gula tidak berlangsung dengan baik, sehingga rendemen yang diperoleh rendah. (c) Kandungan bahan organik rendah (lahan untuk tebu menghendaki kandungan bahan organik minimum 3%). (d) Varietas kurang sesuai, karena selama ini orientasi perakitan varietas adalah untuk lahan sawah dengan pengairan yang terjamin. Akibat ketidaksesuaian ini tanaman mengalami cekaman air pada awal pertumbuhan yang ditunjukkan dengan berkurangnya

pembentukan anakan dan berkurangnya tinggi dan diameter batang. Pada saat musim hujan datang, tanaman akan lebih memperbaiki pertumbuhan vegetatif sehingga pembentukan gula tidak maksimum. Selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 1997 – 2000 produksi tebu relative menurun. Aspek yang menjadi penentu produksi gula di PG De Maas, dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu penurunan produksi gula lebih disebabkan oleh penurunan produktivitas tebu dan rendahnya rendemen yang diperoleh dalam batang tebu dan kurangnya luas areal. Luas areal dari tahun tahun semakin sempit, karena dikeluarkannya Keppres No. 19 Tahun 1998 yang membatasi wewenang Bulog hanya untuk komoditas beras. Sejak saat itu Industri Gula Nasional (IGN) Indonesia masuk kedalam area “perdagangan bebas” dengan tarif import bea masuk 0% (Dyah Estu, 2010:41). Masuknya serangan gula impor tanpa tarif tersebut menyebabkan petani enggan menanam tebu karena hasilnya merugi, maka luas lahan dan produksi nasional juga merosot. Munculnya surat keputusan ini menjadikan petani tebu terjepit dan harga gula menjadi menurun, sehingga pada akhirnya tahun 2000 PG De Maas Beku Operasi (BO).

Kemunduran produksi gula domestik terutama yang disebabkan oleh menurunnya produktivitas dan efisiensi industri gula secara keseluruhan, mulai dari penanaman tebu sampai ke pabrik gula. Rendahnya produktivitas tanaman Tebu Rakyat (TR) disebabkan oleh sistem budidaya *ratoon* dengan keprasan (pemotongan panen) yang lebih dari 3 kali, bahkan sampai belasan kali, dengan pemeliharaan yang kurang memadai sehingga sebagian besar tanaman banyak terserang hama penyakit. Permasalahan tersebut masih ditambah dengan kurang optimalnya pengelolaan proses tebang-angkut-giling, dimana hal tersebut turut memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap rendahnya produktivitas tebu. Selanjutnya berkaitan dengan tingkat efisiensi pabrik gula, kombinasi permasalahan mesin dan peralatan yang sudah tua dan kualitas bahan baku tebu yang rendah pada akhirnya menyebabkan rendahnya produktivitas kadar gula dalam batang tebu.

Dalam kemerosotan PG De Maas pada tahun 1998 -2000, membawa dampak negatif terhadap penduduk di Kecamatan Besuki. Faktor yang menyebabkan kemerosotan produksi gula di PG De Maas adalah karena adanya Inpres 1998 yang berpengaruh pada kekurangan lahan untuk tanaman tebu. Masuknya serangan gula impor tanpa tarif menyebabkan pabrik gula De Maas beku operasi, dan petani enggan menanam tebu karena harga murah atau tidak dapat menutup ongkos produksi. Hal ini mengakibatkan para tenaga kerja PG De Maas kehilangan pekerjaan, pedagang kaki lima dan penjual asongan juga ikut kehilangan mata pencaharian hidupnya. Menurut Siti Aminah, semenjak produksi gula PG De mengalami kemerosotan, maka warung dagangan sepi karena semakin hari semakin sedikit karyawan. Apalagi setelah pabrik gula beku operasi, maka di sekitar PG De Maas sepi, Siti Aminah sepi pembeli yang membeli diwarungnya akhirnya Siti Aminah memilih menutup warungnya karena pendapatannya tidak lagi mampu kebutuhan hidupnya sehari-hari dan mencari

pekerjaan lain (Wawancara dengan Siti Aminah, 22 September 2013.).

Menurut bapak Soenarto merosotnya PG De Maas membawa dampak buruk terhadap masyarakat dan karyawan. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh kebijakan pemerintah dalam sistem gula. Akibatnya pada tahun 1998 – 2000 status sosial di Kecamatan Besuki menurun karena banyak karyawan Pabrik Gula De Maas di PHK karena pada tahun 2000 beku operasi (Wawancara Soenarto mantan karyawan Staf PG De Maas, 15 September 2013). Sehingga ada karyawan yang selain terkena di PHK, namun ada yang mengalami penurunan secara ekonomi.

Menurut bapak Ali Masykur dampak beku operasi PG De Maas sebagian karyawan staf dipindahkan ke pabrik sesaudara, namun sebagian besar di berhentikan. Sebagian karyawan staf yang dipindah ke pabrik sesaudara ini, tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh direksi yaitu dengan menilai kinerjanya. Disamping itu ada juga karyawan yang di PHK menuntut untuk mendapatkan pekerjaan kembali, akan tetapi pihak perusahaan memutuskan bahwa karyawan yang diberhentikan sudah diluar tanggung jawab perusahaan. Oleh sebab itu banyak karyawan yang terkena berbagai penyakit, karena kehilangan pekerjaan yang selama ini menopang kehidupan keluarganya. Karyawan yang mengalami serangan jantung dan stress karena kehilangan pekerjaan yang selama selama ini mampu membiayai kebutuhan hidup sehari-hari seperti biaya sekolah anak-anaknya namun sekarang tidak mempunyai kemampuan itu lagi, akibatnya ada yang mengalami gangguan jiwa, hal ini yang menjadi lantaran sebagian besar mengalami kejiwaannya kurang baik (Wawancara Ali Masykur Mantan Staf karyawan PG De Maas, 22 September 2013.).

Menurut bapak Warsono dampak kemerosotan dan beku operasi PG De Maas juga dirasakan oleh karyawan musiman, yang kebanyakan berasal dari Kecamatan Besuki termasuk Desa Kalimas. Hal ini banyak menimbulkan permasalahan secara ekonomi, karena mereka tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah PG De Maas tidak beroperasi lagi. Oleh karena itu dari mereka ada juga beralih profesi sebagai sebagai pemulung dan sebagian kecil membuka bengkel agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari (Wawancara Warsono karyawan PG De Maas, 22 September 2013).

Kesimpulan

Pasang surut yang terjadi di Pabrik Gula De Maas pada tahun 1977 – 2000 yaitu ditimbulkan dengan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan gula dalam negeri, serta kesulitan pabrik gula dalam memperoleh lahan penanaman tebu menyebabkan industri gula di Indonesia semakin rentan terhadap gejolak harga di pasar dunia yang cenderung fluktuatif. Pemerintah kemudian menetapkan Inpres No. 9 Tahun 1975 sebagai kebijakan baru dalam industri gula, yang akan mengganti tata hubungan produksi gula dari sistem lama menjadi sistem yang baru. Pelaksanaan Inpres ini secara parsial diarahkan untuk membentuk tata hubungan fungsional pertanian rakyat, dan pembinaan sistem perindustrian gula secara lebih mantap dan maju.

Kehadiran Inpres No. 9 Tahun 1975 yang menjadi landasan diberlakukannya program TRI secara fundamental telah merubah sistem produksi gula di Indonesia. Sistem penanaman tebu yang semula menjadi tanggung jawab dari pabrik gula secara bertahap dilimpahkan kepada petani. Secara historis sistem sewa yang merupakan sistem peninggalan dari pemerintah kolonial Belanda telah dipakai dalam sistem produksi gula selama beberapa dasawarsa terakhir. Dalam sistem ini petani tidak ikut terlibat secara langsung dalam proses pengusahaan tanaman tebu, melainkan hanya sebatas pihak yang menyewakan lahannya kepada pabrik gula.

Faktor *pertama* keluarnya Inpres 1975 menyebabkan produktifitas industri gula di Pabrik Gula De Maas mengalami kenaikan yang signifikan. Tingkat produksi gula pada tahun 1974 hanya 80.942,1 ton, pada tahun 1977 menjadi 179.276,22 ton. Faktor *kedua* adalah meningkatkan produktifitas gula dengan upaya meningkatkan rendemen melalui optimalisasi penerapan sapa usaha tani dan efisiensi teknis di pabrik gula. Kenaikan ini disebabkan adanya usaha perbaikan secara teknis seperti, (a) Memberikan pengairan diawal pertumbuhan, biasanya selama 3 bulan sebelum air hujan mencukupi kebutuhan air tanaman. (b) Melakukan pemupukan untuk mencukupi unsur hara. Pupuk yang diberikan adalah pupuk anorganik untuk mencukupi kebutuhan unsur hara makro yang dianggap kurang. (c) Penggunaan varietas yang dianggap sesuai ditanam di lahan kering dengan kriteria memiliki potensi hasil tinggi. Faktor ketiga adalah menggalakkan rehabilitasi pabrik gula dengan perbaikan mesin-mesin yang tidak dapat difungsikan, karena hal ini sangat berpengaruh sekali dalam produksi gula. Faktor keempat adalah pengaruh suksesnya kepemimpinan Administratur Sadjiwinarto, sehingga pada tahun 1977 masa keemasan yang dicapai Pabrik Gula De Maas. Beliau adalah salah seorang yang berhasil meningkatkan produksi di Pabrik Gula De Maas, sehingga mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, melalui penerapan program kerja yang selalu diawasi dan dipantau membuat program kerja dapat berjalan dengan baik. Prestasi kerja tersebut tentu dengan dukungan karyawan yang membantu meningkatkan produktifitas Pabrik Gula De Maas. Oleh sebab itu produksi gula pada tahun ini mengalami peningkatan dan

Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa 2013

mampu meraih 4 penghargaan. Prestasi ini merupakan puncak perolehan penghargaan, setelah perolehan penghargaan di tahun 1950-an.

Masalah pokok menurunnya produksi gula di PG De Maas adalah rendahnya produksi akibat rendahnya produktivitas dan efisiensi pabrik gula secara keseluruhan mulai dari penanaman tebu sampai produksinya di pabrik gula. Rendahnya produktivitas tanaman Tebu Rakyat (TR) disebabkan oleh sistem budidaya *ratoon* dengan keprasan (pemotongan panen) yang lebih dari 3 kali, bahkan hingga belasan kali, selain pemeliharaan yang kurang memadai, menyebabkan sebagian besar tanaman banyak terserang hama penyakit. Permasalahan tersebut masih ditambah dengan kurang optimalnya pengelolaan proses tebang-angkut-giling. Hal tersebut turut memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap rendahnya produktifitas tebu. Rendahnya rendemen juga dipengaruhi oleh tingkat efisiensi pabrik gula, kombinasi permasalahan mesin dan peralatan yang sudah tua dan kualitas bahan baku tebu yang rendah pada akhirnya menyebabkan rendahnya produktifitas kadar gula dalam batang tebu.

Kemunduran produksi gula juga disebabkan oleh semakin menurunnya luas areal dan produktivitas tebu yang dihasilkan petani serta rendahnya produktivitas pabrik gula serta manajemen pabrik gula yang tidak efisien, adalah pemicu rendahnya produksi gula di De Maas. Walaupun demikian, menurunnya produksi gula di De Maas bukan hanya disebabkan masalah *on-farm* dan ketidak-efisienan Pabrik Gula De Maas, tapi juga sangat dipengaruhi kondisi pasar global yang tidak efisien yang mengakibatkan tidak adanya insentif untuk berproduksi.

Luas areal tebu dari tahun ke tahun semakin sempit. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Keppres No. 19 Tahun 1998 yang membatasi wewenang Bulog hanya untuk komoditas beras. Sejak saat itu Industri Gula Nasional (IGN) Indonesia masuk kedalam area “perdagangan bebas” dengan tarif import bea masuk 0%. Masuknya serangan gula impor tanpa tarif tersebut menyebabkan petani enggan menanam tebu karena hasilnya akan merugi, akibatnya luas lahan dan produksi nasional juga merosot. Munculnya surat keputusan ini menjadikan petani tebu terjepit dan harga gula menjadi menurun. Hal ini menyebabkan petani merasa dirugikan dan beralih ke komoditas tanaman yang lebih menguntungkan. Akibatnya Pabrik Gula De Maas mengalami kekurangan luas areal tanaman tebu dan pada akhirnya tahun 2000 PG De Maas Beku Operasi (BO).

Beku operasi yang terjadi pada Pabrik Gula De Maas pada tahun 2000 tidak hanya merugikan perusahaan akan tetapi juga membawa dampak. Hal itu mengakibatkan sebagian besar para tenaga kerja di PG De Maas kehilangan pekerjaannya, sehingga banyak menimbulkan permasalahan terutama ekonomi masyarakat sekitar menjadi menurun. Akibatnya banyak kebutuhan keluarga menjadi tidak terpenuhi, bahkan mereka juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak lain dari beku operasi Pabrik Gula De Maas adalah sebagian karyawan dipindahkan, karena oleh direksi dinilai mempunyai kinerja bagus. Selain itu kemerosotan PG De Maas juga berdampak pada penutupan warung-warung dan pedagang asongan di sekitar pabrik gula, karena sepi pembeli.

Daftar Pustaka

Buku:

- Adisasmito K. *Sistem Kelembagaan Sebagai Salah Satu Sumber Pokok Permasalahan Program TRI: Suatu Tinjauan*, Retrospeksi Bulletin. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, 1998.
- A. G Kartasapoetra. *Pengantar Ekonomi Produksi Pertanian*. Jakarta :Bina Aksara, 1988.
- Arum Sabil. *Mendobrak Petani Tebu*. Jember: Institute Of Civil Society, 2005.
- Darsono Wiradirana. *Sosiologi Pedesaan (Kajian Kultural dan Struktural Masyarakat Pedesaan)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- De Jonge, Huub. *Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam*. Jakarta: PT Gramedia, Anggota IKAPI, 1989
- Dibyو Prabowo. *Dalam Perjalanan Waktu*. Surabaya: Airlangga University Press, 1998.
- Dyah Estu K, *Ekonomi Politik Kebijakan Gula di Indonesia*. Malang: UMM Press, 2010.
- Dudung Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Edy Burhan Arifin dan Nurhadi Sasmita, et. al., *Quo Vadis Hari Jadi Kabupaen Situbondo*. Situbondo: Bappekab dan Kapyawisda Jatim, 2008
- Elson. *Javanese Peasant and the Colonial Sugar Industry. Impact and Change in an Easr Java Residency, 1830-1940*. Singapore: Oxford University Press, 1984.
- Faisal H. Bisri. *Prospek Ekonomi Indonesia Dalam Jangka Pendek: Peluang dan Tantangan Dalam Sektor Riil dan Utilitas Pada Dasawarsa 1990-an*. Jakarta: P.T GramediaPustaka Utama, 1993.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah* Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: YayasanPenerbit Universitas Indonesia, 1975.
- Husken, Frans. *Hidup di Sekitar Pabrik Gula: Petani Comal Pada Abad Ke-20* (ed) Hiroyosi Kano dalam Di Bawah Asap Pabri Gula. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Imam Churmen. *Menyelamatkan Industri Gula Indonesia Edisi I*. Jakarta :Millenium Publisher, 2001.
- Ida Bagus Mantra. *Mobilitas Penduduk Sirkuler dari Desa ke Kota di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1989.
- John Suprihanto dan Murti Sumarmi. *Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan) edisi kedua*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Kano, Hiroyosi. *Sejarah Ekonomi Masyarakat Pedesaan Jawa: Sesuatu Penafsiran Kembali*”, dalam Akira Nagazumi (ed), *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial Ekonomi Abad XIX dan X dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Kabul Santoso, dkk. *Pendekatan Baru Dalam Pembangunan Di Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996
- Knight, G.R. *Kaum Tani Dan Budi Daya Tebu Di Jawa Pada Abad Ke-19: Studi dari Karesidenan Pekalongan 1830 -1870* (ed) Anne Booth dalam *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3S 1988.
- Kuntohartono T. *Perkebunan Indonesia Di Masa Datang*. Jakarta: Yayasan AgroEkonomi, 1987.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1995.
- Kurasawa, Aiko. *Mobilisasi dan Kontrol, Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: PT. Grasindo, 1993.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Efendi. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- McCauley, Peter. *Industrialization In Indonesia: Development and Prospect*. Canberra: ANU, 1997.
- Melly G.Tan. “Masalah Perencanaan Penelitian,” dalam Koentjraningrat (ed.), *Metode-Metode Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.

- M. Husein Sawit. et al.” Penyelamatan dan Penyehatan Industri Gula Nasional”, Kajian Akademis. Jakarta : Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, 2004
- Mubyarto, *Masalah Industri Gula di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE, 1984
- Mubyarto, Damayanti, *Gula Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991.
- Nawiyanto. *The Development Of Plantations In Jember: During The Late Colonial Period 1859 – 1942*. Yogyakarta: LEMBAH MANAH, 2008.
- _____. “The Economy of Besuki in the 1930s Depression” dalam Peter Boomgaard dan Ian Brown (ed), *Weathering the Storm*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000
- _____. *Transforming The Frontier: Enviromental Change In a Region Of Java, Besuki 1870-1970*. Yogyakarta: Lembah Manah, 2009
- Nur Mahmudi Isma’il. “Peningkatan Daya Saing Industri Gula Nasional Sebagai Langkah Menuju Persaingan Bebas”. (Jakarta: Science and Technologi Policy) dalam *ITECS Journal* Vol. II, 2001.
- O. Malley, William J. “Perkebunan 1830-1840: Ikhtisar”, dalam Anne Booth (ed.), *Sejarah ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Pappas, James L. dan Marks Hirschey. *Ekonomi Manajerial Edisi Keenam Jilid 1*. Jakarta : Binarupa Aksara, 1995
- Parker, S. R.. *Sosiologi Industri*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990.
- RB. Muhd Rofiq. Ks. *Sejarah Hari Jadi Kabupaten Situbondo*. Situbondo: Bappekab Situbondo, 2004.
- Reid, Anthony dan David Marr. *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka: Indonesia dan Masa Lalunya*. Jakarta: Grafity Pers, 1983
- Roll, Warner. *Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia*, terj. Jan Tjan. Jakarta: Rajawali , 1976.
- R. Sodo Adisewojo. *Bercocok Tanam Tebu*. Bandung: PT Balle, 1988.
- Sadono Sukirno, *Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Bina Grafika, 1982.
- Sartono Kartodirdjo,. *Sejarah Perkebunan Di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1994.
- _____. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- _____. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- _____. *Sejarah Perkebunan Di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1994.
- _____, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia II: Jaman Kuno*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975
- Smelser, N.J. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta:Wirasari 1987.
- Sritua Arief. *Ketergantungan dan Keterbelakangan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Sugijanto Padmo. Bunga Rampai “*Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesi*”. Yogyakarta: Aditya Media, 2004.
- Sutarto. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada Univ Press. 1988.
- Suwandi Arief (Eds). *Pembangunan Lima Tahun Di Jawa Timur 1969-1988*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI:1999.
- Tennekes, J. “*De bevolkingsspreiding der Residentie Besuki in 1930*”, Tijdschrift Van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 80,2:1963
- Thompson, Paul. *Suara Dari Masa Silam*, Terjemahan Windu W. Yusuf. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Van Schaik, Arthur. *Pahit-pahit Manis: Seabad IAndustri Comal* (ed) Hiroyosi Kano, *Di Nawah Asap Pabrik Gula*. Yokyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Wawancara:**
- Ali Masykur, 69 tahun, mantan karyawan staf PG De Maas, penduduk di Desa Kalimas Kecamatan Besuki, 15 September 201
- Siti Aminah, 59 tahun, pedahang, penduduk di Desa Kalimas Kecamatan Besuki, 22 September 2013.
- Soenarto, 69 tahun, mantan karyawan Staf PG De Maas, di Desa Kalimas Kecamatan Besuki, 15 September 2013.
- Warsono, 50 tahun, karyawan PG De Maas, Desa Kalimas Kecamatan Besuki 22 September 20.